

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN GOOD
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

Oleh :

Vivid Annisa

Pembimbing : Edfan Darlis dan Al Azhar A

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : vivid.annisa@gmail.com

*The Effect Of Financial Accounting System, Financial Management Area, And
Good Governance Of Local Government Performance*

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the effect of regional financial accounting system, financial management, and good governance on the performance of local government in the city of Pekanbaru. The population in this study are public servants of local government in the city of Pekanbaru SKPD consisting of 5 offices, 17 offices and 10 agencies. Mechanical sample selection using purposive sampling method. The sample in this study is the Head of Finance, Head of Programs and Staff Accounting / Finance, on the whole there were 3 respondents from each SKPD. So that the number of respondents in this study there were 96 respondents, but the amount of data that can be processed as many as 85 respondents. The data used is primary data sourced from respondents, with direct spreading questionnaire and analyzed using SPSS. Analysis of the data used in this study using multiple linear regression. The results of this study indicate that the area of financial accounting system, financial management and good governance on the performance of local government.

Keywords: The area of financial accounting system, financial management, good governance, local government performance

PENDAHULUAN

Kinerja adalah suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal, yaitu: membantu

memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2007).

Pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efesiensi

dan efektifitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya (Mardiasmo, 2007: 44). Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinnya, dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Fenomena yang terjadi pada kinerja pemerintah daerah oleh SKPD di Kota Pekanbaru dan masalah yang selalu menjadi sorotan oleh masyarakat adalah tidak efektifnya kinerja tersebut karena pencapaian yang diinginkan kadang tidak sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditetapkan.

Fenomena selanjutnya yaitu masih banyaknya temuan dari hasil audit BPK terhadap kinerja pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya jadwal penyusunan APBD Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2012 tidak tepat waktu sesuai ketentuan, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) belum sesuai ketentuan, Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dalam enam BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru belum ditetapkan, dan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru selalu Wajar Dengan Pengecualian.

Peneliti menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah

daerah diukur dengan indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Mahsun, 2006:77)

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk menunjang dan memperkuat kinerja perlu dilakukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ditegaskan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bab XI pasal 232 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah. Para pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil Penelitian telah dilakukan oleh Usman dan Lukman Pakaya (2014), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Faktor kedua adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah (Abdul Rohman, 2007).

Berdasarkan hasil Penelitian telah dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Faktor ketiga adalah *good governance*. Dengan melaksanakan *good governance* salah satu manfaat yang bisa diambil adalah meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi serta lebih meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil Penelitian telah dilakukan oleh Mulyawan (2009), *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 2) Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 3) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, 2) Mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, 3) Mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2006:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Menurut Mohamad Mahsun (2006:77) indikator kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) Indikator Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. 4) Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 5) Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Jogiyanto (2010:2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Menurut Abdul Halim (2007:42), definisi dari Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Indra Bastian (2010) adalah: "Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh aktifitas keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercaya dan untuk menunjukkan keuangan daerah".

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 233).

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan

mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2008 : 35).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Good Governance

Menurut Permen PAN No. 13 tahun 2009 *good governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proposional sebagai tiga pilar utama. Konsep ini menunjukkan bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih

berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.

Mardiasmo (2007:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti bahwa akuntansi menjadi lebih diperlukan, untuk menjalin komunikasi antara pihak eksternal dan internal dari sebuah organisasi, dengan adanya sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal dan internal.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2007). Dengan sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan laporan keuangan menyediakan informasi yang kurang handal dan tidak relevan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan

lahirnya keputusan yang buruk. Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas anggaran yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan terhadap kinerja SKPD.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah H_1 : Diduga sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Implementasi pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja merupakan syarat implementasi konsep *value for money*. Konsep kinerja penting bagi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai dasar pelaksanaan *public accountability*. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi.

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pimpinan Pemda untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran, sehingga memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas pimpinan Pemda. Individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin meningkat (Rohman 2009). Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah, artinya jika pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kinerja

pemerintah dan begitu juga sebaliknya.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah H_2 : Diduga pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Dengan melaksanakan *good governance* salah satu manfaat yang bisa diambil adalah meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi serta lebih meningkatkan pelayanan publik.

Dengan melaksanakan *good governance* yang baik, tentu kinerja suatu instansi pemerintah akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Mulyawan, 2009).

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah H_3 : Diduga *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive*

sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/Keuangan yang bekerja di SKPD Kota Pekanbaru.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/Keuangan merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang dari 32 SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan aparat kinerja pemerintah daerah pada masing-masing SKPD Kota Pekanbaru..

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu dengan uji statistik t yaitu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 1) $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 2) $H_a = \beta_1 \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $p\text{-value} > 0,05$ dan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel yang diuji tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indikator Masukan, Indikator Proses, Indikator Keluaran, Indikator Hasil, Indikator Manfaat, Indikator Dampak.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur dengan indikator yaitu: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset Tetap Atau Barang Milik Daerah, Prosedur Akuntansi Selain Kas, dan Penyajian Laporan Keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penertanggungjawaban, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator dalam variabel ini adalah Perencanaan, Pelaksanaan APBD, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan.

Good Governance

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan, *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Variabel ini diukur berdasarkan: *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Transparency* (Keterbukaan), dan *Fairness* (Keadilan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner dibagikan sebanyak 32 SKPD (196 kuesioner). Kuesioner yang kembali sebanyak 88 kuesioner atau 91,7%. Sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah adalah 3 kuesioner atau 3,4%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner disebarkan adalah 85 kuesioner atau 88,5%.

Hasil Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian

tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Model	N	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic
KPD (Y)	85	26.9059	3.52752
SAKD (X1)	85	25.8824	4.02200
PKD (X2)	85	43.2471	5.67347
GG (X3)	85	49.2471	5.14501
Valid N (listwise)	85		

Sumber : Data olahan, 2016

Nilai rata-rata ketiga variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Pengujian Data

1. Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation*. Nilai *r* hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai *r* tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai *r* hitung > *r* tabel maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh $df = 85 - 2 = 83$ dengan tingkat signifikan 5%. Nilai *r* tabel dengan derajat bebas (*df*) 83 adalah 0,213.

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dari tabel tersebut terbukti bahwa *r* hitung > *r* tabel sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

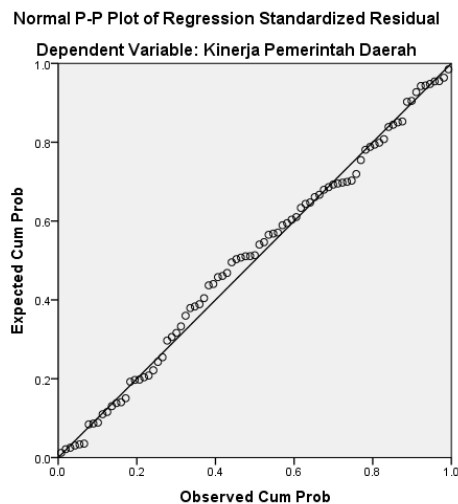
Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel > 0,60.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik *P-P Plot*. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013). Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Normal P-P Plot Regression
Standardized Residual



Sumber : Data olahan, 2016

Dari Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji asumsi klasik

1. Uji Multikolinieritas

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.618	1.617
	Pengelolaan Keuangan Daerah	.650	1.538
	Good Governance	.572	1.750

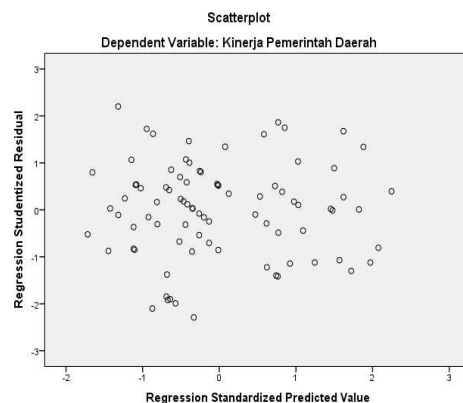
Sumber : Data olahan, 2016

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF <10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2

Hasil uji heterokedastisitas



Sumber : Data olahan, 2016

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.650 ^a	.422	.401	2.73057	1.799

Sumber : Data olahan, 2016

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* pada variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai 1,799. Dengan demikian, nilai *Durbin-Watson* berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi independen.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel berikut menunjukkan hasil uji statistik t pada penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.601	2.408		.249	.804
1 SAKD	.300	.076	.342	3.941	.000
PKD	.159	.053	.256	3.035	.003
GG	.237	.062	.346	3.840	.000

Sumber : Data olahan, 2016

Hasil Uji Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar (3,941) dan t_{tabel} sebesar (1,990) serta P_{value} sebesar (0,000) < 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $P_{value} < (0,05)$, maka hasil penelitian ini adalah H_0 ditolak dan **H_1 diterima**, yaitu variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkatnya sistem akuntansi keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wawan dan Lia (2009) dan Lukman dan Pakaya (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menerangkan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4 diatas,

diperoleh nilai t_{hitung} sebesar (3,035) dan t_{tabel} sebesar (1,990) serta P_{value} sebesar (0,003) < 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $P_{value} < (0,05)$, maka hasil penelitian ini adalah H_0 ditolak dan **H_1 diterima**, yaitu variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkatnya pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009) dan Rahmad Hidayat (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menerangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar (3,840) dan t_{tabel} sebesar (1,990) serta P_{value} sebesar (0,000) < 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $P_{value} < (0,05)$, maka hasil penelitian ini adalah H_0 ditolak dan **H_1 diterima**, yaitu variabel *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkatnya *good governance* maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan (2009) dan Sandra, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini

menerangkan bahwa *good governance* dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 5
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	0.624	0.61	2.20285	1.938

Sumber : *Data olahan, 2016*

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square sebesar (0,624), artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 62,4%. Sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik pengelolaan

keuangan daerah maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.

- 3) *Good Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin baik *good governance* maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan ikut meningkat.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian yang tidak hanya dilaksanakan di SKPD Kota Pekanbaru, tapi di Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung kepada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah sampel penelitian, sehingga memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga*
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan*

- Program SPSS dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresif*. BP Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Hidayat, Rahmad. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto. 2010. *Analisi dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyawan, Budi. 2009. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang). *Skripsi*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
- , Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Vol 9 No. 1: 21-32. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Sandra, dkk. 2014. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan *Good Goverment* Terhadap Penilaian SKPD (Studi Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu). *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi-Universitas Riau.
- Sukmana, Wawan dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). ISSN: 1907-9958. Vol.4 no.1. *Jurnal Akuntansi*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Usman dan Lukman Pakaya. 2014.
Pengaruh Pemahaman Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
Terhadap Kinerja SKPD Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten
None Bolango. Jurnal
Akuntansi.